



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GAFFAR MOH NADSIR
2. Jabatan : KEPALA SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH
3. NHK : 677813

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.060.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/98 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/97 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.376.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 CBS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.376.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 86.189.429**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.287.565.429



III. HUTANG

Rp. 453.409.640

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 834.155.789

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.